

KIM

Masyarakat Pejuang Militan Bogor Gelar Rapat Kerja Penguatan Organisasi Berdayasaing Mandiri

Anton atong sugandhi - PANGANDARAN.KIM.WEB.ID

Jan 31, 2022 - 05:04





BOGOR - LSM Masyarakat Pejuang Bogor(MPB) menggelar talk show dengan mendatangkan narasumber diantaranya Dr. Wahyu eko direktur RSUD, Dr. Ester kapid yankes dinkes, dr. Ratih kapid BPJS berhubungan dengan kerumahsakitannya, Dian kapid dayasos dinsos, Sony disdukcapil.

Rapat kerja ke 2 ini digelar dalam rangka penguatan kapasitas pejuang militan MPB menuju organisasi yang berdayasaing dan mandiri," kata Ketua Umum MPB Atiek Yulis Setyowati, dalam pidatonya, di acara talk show yang digelar di ruang gedung paripurna kantor dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) tegar beriman Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat," Minggu (30/01/2022)

Disampaikannya bahwa, Talkshow MPB ini hanya baru fokus tentang rangkaian bidang kesehatan, yang mana ada satu permintaan kami' yaitu harus segera dibangunnya " *System yang lebih Efektif dan Efisien*.

" Lanjut Atik, kan pendaftaran BPJS PBI dan pengalihan BPJS PBI biasanya nunggu berbulan-bulan sampai berkas numpuk, ya itu akibat dari nunggu tanggal di sekaliguskan.

Misal, berkas yang masuk di Dinsos paling cepat per bulannya ditunggu sampai tanggal 8, baru dilanjut ke dinkes juga menunggu inputan selesai sampai tanggal 20, setelah itu baru nyebrang ke BPJS, itu akan makan waktu lama', kan masyarakat keburu nunggu BPJS yang akhirnya ada penolakan dengan alasan "premi nunggu, yang mestinya di aturan BPJS tunggakan bisa diendapkan, tapi di Perbub nya diatur harus dilunasi terlebih dahulu" itu kan tidak nyambung," papar Atik.

Kami mohon agar Dinsos juga membangun System yang lebih efektif, yang mana apabila alur berkas sudah masuk ke dinsos, detik itu juga diinput, langsung klik kirim ke dinkes, di dinkes juga diinput langsung klik kirim ke BPJS.

Itu semua kan beres bisa kelar dalam 1 hari kerja". Jangan sampai Birokrasinya kepanjangan dengan tanda tangan ini itu dan ahirnya kan berkas jadi ngendap, tumpukan berkas itulah yang bikin semua tidak beres," kata Atik.

Menurutnya, kami MPB bersama para pejuang pendampingan, jika ada

masyarakat yang mengurus BPJS, atau Jamkesda, kami bawa semua administrasi mulai dari, Rt, Rw, desa, kecamatan, langsung diserahkan ke dinsos' selebihnya dinsos dan dinkes yang menyelesaikannya" namun kenyataan setelah berkas masukpun ternyata masih saja ada kendala." Ya belum aktiflah.

Jika Jamkesda juga tidak tuntas, karena sudah pernah dipakai padahal si pasien baru pulang beberapa hari di rumahnya, akan tetapi sipasen tersebut ngedrop lagi yang ahirnya harus dirawat lagi" Maka, kasus tersebut kami serahkan ke dinkes untuk dituntaskan", Semestinya, semua biaya Rumah Sakit untuk warga yang tidak mampu menjadi tanggung jawab Pemda (Dinsos dan dinkes), nah seharusnya itulah rangkaian administrasinya.

Atiek menambahkan, kami mohon agar di Dinsos pun segera dibangun System' yang mana apabila alur berkas sudah masuk ke dinsos, di detik itu juga harus diinput, langsung klik kirim ke dinkes, di dinkes juga diinput langsung klik kirim ke BPJS.

Sebenarnya, tambah Atik, apabila semua itu dilaksanaka dengan profesional, proses itu kan 1 hari bisa kelar dan beres. Itu birokrasinya yang kepanjangan dengan tanda tangan ini dan itu hingga berkas ngendap ahinya kan numpuk, itulah yang bikin semua tidak beres," paparnya.

Ditempat yang sama Kepala Bidang Yankes Dinkes Kabupaten Bogor Dr Ester dalam sambutannya mengatakan, Kiprah Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Bogor (MPB) manfaatnya cukup besar" sebagai sosial control dalam membantu pemerintah dilapangan saat menangani masyarakat miskin cukup dirasakan.

Tambah Ester, kami apresiasi sekali dan terimakasih kepada para relawan MPB yang telah membantu masyarakat miskin." Terkait masukan masukan juga solusi yang diberikan kepada kami, itu semua kami tampung dan secepatnya dibawa dalam rapat pimpinan kedinasan dan stekholder pemkab, terutama dengan dewan dan sekda sehingga nantinya bisa terbangun system yang efektif dan efisien.

Tidak hanya yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, tapi juga hal lain seperti CSR, BPJS, Lingkungan, Perlindungan Anak dan sosial lainnya," kata Ester.

(Muhamad Janwar/Cawang)